

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Pertahanan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan TNI tidak sesuai lagi dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pertahanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA
NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.
2. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
3. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN.
4. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengeralihan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 2

- (1) Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh masing-masing unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk:

- a. menetapkan rencana kinerja jangka menengah;
 - b. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - c. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - e. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis pertahanan negara.
- (2) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Kepala Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 4

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Menteri ini, Inspektorat Jenderal Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diberikan tugas untuk:

- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja untuk meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja; dan
- b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dan melaporkan kepada Kepala Unit Organisasi masing-masing dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 244), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGIANTORO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 22 TAHUN 2014
 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN
 PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Organisasi : Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan.
 - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan.
 - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan.
 - d. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pertahanan. • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Dukungan Kesiapan Matra Darat. • Dukungan Kesiapan Matra Laut. • Dukungan Kesiapan Matra Udara.
		Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan, Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. 	

2.	Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.	Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas}) / (\text{Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan dan TNI AD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi Pertahanan. • Dukungan Kesiapan Matra Darat.
		Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun lalu} - \text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun ini}) / (\text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan dan daerah rawan tahun lalu}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Kemhan dan TNI AD. 	
3.	Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.	Persentase seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga}) / (\text{Jumlah wilayah daerah terpencil dan perbatasan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Mabes TNI dan TNI AD. 	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif. • Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat.
4.	Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu} - \text{Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun ini}) / (\text{Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Mabes TNI dan TNI AL. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Profesionalisme Prajurit Integratif. • Dukungan Kesiapan Matra Laut.
5.	Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman.	Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman}) / (\text{Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan UO Mabes TNI, TNI AL, dan TNI AU. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif. • Dukungan Kesiapan Matra Laut.

				<ul style="list-style-type: none"> Dukungan Kesiapan Matra Udara.
6.	Sistem Pertahanan Negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. Tipe penghitungan: Non kumulatif. Sumber data: Laporan UO Kemhan. 	Penelitian dan Pengembangan Kemhan.
7.	Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek. Tipe penghitungan: Non kumulatif. Sumber data: Laporan UO Kemhan. 	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan.
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun ini} - \text{Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun lalu}) / (\text{Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri tahun lalu}) \times 100\%$. Tipe penghitungan: Kumulatif. Sumber data: Laporan UO Kemhan. 	

1. Nama Unit Organisasi : Kementerian Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

3. Fungsi :
- Koordinasi kegiatan Kementerian.
 - Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
 - Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Kementerian Koordinator, Kementerian Negara, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan lembaga lain yang terkait.
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Menteri.
4. Indikator Kinerja Utama.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang dipetakan dan ditindaklanjuti}) / (\text{Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global}) \times 100\%$. Tipe penghitungan: Non kumulatif. Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. 	Strategi Pertahanan.
2.	Seluruh wilayah perbatasan memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.	Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara yang memiliki batas yang jelas}) / (\text{Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, dan udara}) \times 100\%$. Tipe penghitungan: Non kumulatif. Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. 	Strategi Pertahanan.
		Persentase penurunan pelanggaran wilayah perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun lalu} - \text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun ini}) / (\text{Jumlah pelanggaran wilayah perbatasan tahun lalu}) \times 100\%$. Tipe penghitungan: Kumulatif. Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. 	
3.	Sistem Pertahanan Negara menerapkan teknologi mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal	Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman	<ul style="list-style-type: none"> Formulasi penghitungan: Jumlah penerapan teknologi yang mutakhir yang mampu mengidentifikasi, menangkal dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Penelitian dan pengembangan Kementerian Pertahanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
	dan menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	secara terintegrasi dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Balitbang. 	
4.	Kemhan berpartisipasi aktif dalam membela harkat, martabat dan kepentingan nasional di tingkat nasional, regional dan internasional.	Persentase penyelesaian sengketa perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyelesaian sengketa perbatasan}) / (\text{Jumlah seluruh sengketa perbatasan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditjen Strahan. 	Strategi Pertahanan.
5.	Sarana dan prasarana pertahanan memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara mandiri.	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Baranahan. 	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan.
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah sarana dan prasarana pertahanan produksi dalam negeri}) / (\text{Jumlah sarana dan prasarana pertahanan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Baranahan. 	

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal.
2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian.
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertahanan.
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian.
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Eselon I
1.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan.	Opini BPK.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Opini BPK. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Itjen. 	Inspektorat Jenderal.
		Presentase satuan kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan, target kinerja, dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan kerja yang berhasil mencapai standar pelayanan, target kinerja dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan)/(Jumlah satuan kerja yang diperiksa) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Itjen. 	

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Meningkatnya kinerja	Persentase pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pengaduan masyarakat yg 	Pengawasan	Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
	dan akuntabilitas aparaturnya Kemhan di bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan.	masyarakat yang dituntaskan tepat waktu.	dituntaskan tepat waktu)/(Jumlah pengaduan yang diterima) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. 	Umum.	Umum.
Persentase penurunan temuan bidang wasum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu - Jumlah temuan bidang wasum tahun ini)/(Jumlah temuan bidang wasum tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. 				
Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang kelembagaan, SDM dan peraturan perundang-undangan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Umum. 				
2.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparaturnya Kemhan di bidang pengadaan.	Persentase penurunan temuan bidang pengadaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu - Jumlah temuan bidang pengadaan tahun ini)/(Jumlah temuan bidang pengadaan tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. 	Pengawasan Pengadaan.	Inspektorat Pengadaan.
Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang pengadaan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. 				
Persentase rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi penanggulangan pencegahan pengadaan 				

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
		penanggulangan pencegahan pengadaan Barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI yang ditindak lanjuti.	Barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI yang ditindak lanjuti)/(Jumlah rekomendasi hasil audit Tim Konsultasi penanggulangan pencegahan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemhan/TNI) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Pengadaan. 		
3.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang keuangan.	Persentase penurunan temuan bidang keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu - Jumlah temuan bidang keuangan tahun ini)/ (Jumlah temuan bidang keuangan tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. 	Pengawasan Keuangan.	Inspektorat Keuangan.
Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan yang ditindak lanjuti)/ (Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang keuangan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. 				
Persentase pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA)/(Jumlah pelaporan keuangan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Keuangan. 				
4.	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan di bidang logistik.	Persentase penurunan temuan bidang logistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu – Jumlah temuan bidang logistik tahun ini)/ (Jumlah temuan bidang logistik tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. 	Pengawasan Logistik.	Inspektorat Logistik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. 		
		Persentase rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik yang ditindak lanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik yang ditindak lanjuti}) / (\text{Jumlah rekomendasi hasil audit/evaluasi bidang logistik}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. 		
		Persentase pelaporan BMN sesuai dengan Simak BMN.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelaporan BMN sesuai dengan Simak BMN}) / (\text{Jumlah pelaporan BMN}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Logistik. 		

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertahanan.
 - b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertahanan.
 - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Pertahanan.
 - d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat.
 - e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum.
 - f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan.	Jumlah satker yg menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah satker yg menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan UO Kemhan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Setjen. 	Sekretaris Jenderal.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
1.	Meningkatnya satuan kerja yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg.	Jumlah Satker Kemhan dan TNI yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Satker Kemhan dan TNI yang menerapkan teknologi informasi dan komunikasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam sistem informasi Hanneg. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara.	Pusat Data dan Informasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Pusdatin. 		
2.	Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan data yang <i>terkini</i> , terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.	Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah laporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusku. 	Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan.	Pusat Keuangan.
		Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusku. 		
3.	Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yang akuntabel.	Persentase penyelesaian perkara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyelesaian perkara hukum}) / (\text{Jumlah perkara hukum}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Hukum. 	Pelayanan Bantuan Hukum.	Biro Hukum.
4.	Meningkatnya penyandang cacat personel pertahanan memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga mandiri serta jenis layanan perumahsakitannya yang memenuhi standar mutu dengan administrasi yang akuntabel dan tepat waktu.	Persentase penyandang cacat personel pertahanan yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyandang cacat personel pertahanan yang memperoleh rehabilitasi hingga mandiri}) / (\text{Jumlah penyandang cacat personel pertahanan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusrehab. 	Pelayanan Rehabilitasi dan Perumah Sakitan.	Pusat Rehabilitasi.
		Persentase jenis layanan perumah sakitan yang memenuhi standar mutu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah jenis layanan perumah sakitan yang memenuhi standar mutu}) / (\text{Jumlah jenis layanan perumah sakitan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusrehab. 		
5.	Pencapaian standar pelayanan prima dalam bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik, perbekalan dan	Persentase pelayanan bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik, perbekalan dan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelayanan bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sasaran}) / (\text{Jumlah})$ 	Dukungan Pelayanan Umum UO	Biro Umum.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
	poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan.	fasilitas bangunan yang dapat diselesaikan secara tepat waktu dan sasaran.	pelayanan bidang pengamanan, kerumahtanggaan dan poliklinik, perbekalan dan fasilitas bangunan) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Umum. 	Kemhan.	
6.	Satuan kerja UO Kemhan memiliki pegawai sesuai kualifikasi kompetisi dan kebutuhan dengan kesejahteraan terjamin.	Persentase personel yang kompeten di bidangnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang kompeten di bidangnya)/(Jumlah personel) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Kepegawaian. 	Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai UO Kemhan.	Biro Kepegawaian
7.	Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program serta pelaporan program kerja dan anggaran UO Kemhan jangka pendek dan sedang yang terkini , akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Persentase penyusunan dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penyusunan dokumen program dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah penyusunan dokumen program dan anggaran) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Perencanaan. 	Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program Kerja UO Kemhan.	Biro Perencanaan.
		Persentase kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kegiatan yang sesuai dengan dokumen perencanaan)/(Jumlah kegiatan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Perencanaan. 		
		Jumlah kebijakan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan di lingkungan UO Kemhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan penataan ketatalaksanaan dan kelembagaan di lingkungan UO Kemhan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Biro Perencanaan. 		
8.	Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tata usaha kementerian yang sinergis, akuntabel, dan tepat waktu.	Persentase dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan tepat waktu, dan sesuai SOP.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai SOP)/(Jumlah dukungan administrasi dan pelayanan tugas pimpinan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Biro Tata Usaha. 	Dukungan Administrasi Pelayanan Pimpinan UO Kemhan.	Biro Tata Usaha.
9.	Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di masyarakat dan forum internasional.	Persentase berita dan informasi tentang pertahanan negara yang dipublikasikan dan direspon secara faktual, akurat, dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah berita dan informasi tentang pertahanan negara yang dipublikasikan dan direspon secara faktual, akurat dan tepat waktu)/(Jumlah berita dan informasi tentang pertahanan negara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puskom Publik. 	Pelayanan Komunikasi Publik.	Pusat Komunikasi Publik.

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang strategi pertahanan negara.
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara meliputi perumusan kebijakan strategis, pengerahan komponen pertahanan, analisa lingkungan strategis, kerjasama internasional, wilayah pertahanan dan hukum strategi pertahanan.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang penyelenggaraan strategi pertahanan negara.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan	Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditjakstra. 	Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan.
		Persentase pelaksanaan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaksanaan kebijakan 	

global.	pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor)/(Jumlah pelaksanaan kebijakan pertahanan negara) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditjakstra. 	
---------	--	--	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Terlaksananya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global secara tepat waktu dengan data yang terkini dan akurat.	Jumlah produk kajian prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk kajian prediksi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditanstra. 	Analisa Strategis.	Direktorat Analisa Strategis.
2.	Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	Jumlah dokumen kebijakan strategis yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah dokumen kebijakan strategis yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditjakstra. 	Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif.	Direktorat Kebijakan Strategis.
3.	Keberhasilan pencapaian kepentingan nasional dalam bidang pertahanan di forum internasional.	Jumlah kerja sama bidang pertahanan dengan Negara sahabat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kerja sama bidang pertahanan dengan Negara sahabat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkersin. 	Kerjasama Internasional.	Direktorat Kerjasama Internasional.
4.	Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan	Jumlah rumusan kebijakan pengerahan komponen	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah rumusan kebijakan pengerahan komponen pertahanan 	Perumusan kebijakan	Direktorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
	komponen pertahanan negara dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global.	pertahanan negaran dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global.	<p>negaran dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik nasional, regional, maupun global.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditrah. 	pengerahan komponen Haneg.	Pengerahan.
5.	Tersusunnya kelengkapan perumusan hukum strategi pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	Jumlah draft peraturan perundangan bidang pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah draft peraturan perundangan bidang pertahanan negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional dan tantangan global serta diimplementasikan secara sinergis lintas sektor. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkumstrahan. 	Perumusan hukum strategi pertahanan.	Direktorat Hukum Strategi Pertahanan.
6.	Wilayah pertahanan yang memiliki batas yang jelas, tata ruang serta survey dan pemetaan yang terintegrasi, akuntabel dan terkini.	Jumlah peta yang direvisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah peta yang direvisi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditwilhan. 	Pengelolaan wilayah pertahanan.	Direktorat Wilayah Pertahanan.

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara meliputi perencanaan pembangunan pertahanan, perencanaan program dan anggaran, administrasi pelaksanaan anggaran, pengendalian program dan anggaran.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran pertahanan negara.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat waktu, dan mampu memenuhi kebutuhan.	Persentase perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pelaksanaan perencanaan dan penganggaran pertahanan negara yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu}) / (\text{Jumlah perencanaan dan penganggaran pertahanan negara}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Kumulatif. 	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan.

			• Sumber data: Laporan Ditjen Renhan.	
--	--	--	---------------------------------------	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Terwujudnya administrasi pelaksanaan anggaran yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Persentase penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu}) / (\text{Jumlah dokumen pelaksanaan anggaran}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditminlakgar. 	Administrasi dan pelaksanaan anggaran.	Direktorat Administrasi Pelaksanaan Anggaran.
		Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman dalam negeri dan luar negeri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penyelesaian administrasi pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman dalam negeri dan luar negeri. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditminlakgar. 		
2.	Terpetakannya faktor keberhasilan dan ketidakberhasilan unit organisasi dalam pelaksanaan program dan anggaran.	Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil dalam pelaksanaan program dan anggaran. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditdalprogar. 	Pengendalian dan Program Anggaran.	Direktorat Pengendalian Program dan Anggaran.
3.	Tercapainya perencanaan pembangunan pertahanan jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Persentase dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang diselesaikan tepat waktu}) / (\text{Jumlah dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditrenbanghan. 	Perencanaan Pembangunan Pertahanan.	Direktorat Perencanaan Pembangunan Pertahanan.
4.	Tercapainya hasil perencanaan program dan anggaran tahunan U.O Kemhan, Mabes TNI, TNI	Persentase dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan tepat waktu}) / (\text{Jumlah dokumen rencana kerja dan})$ 	Perencanaan Program dan Anggaran.	Direktorat Perencanaan Program dan Anggaran.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
	AD, TNI AL, dan TNI AU yang terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.		anggaran (RKA) dan DIPA) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditrenprogar.		

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang potensi pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan nir militer.
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang potensi pertahanan meliputi kesadaran bela negara, komponen cadangan, komponen pendukung, pembinaan teknologi dan industri pertahanan serta pembinaan veteran.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang potensi pertahanan nir militer.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang potensi pertahanan nir militer.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Seluruh masyarakat, sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional berdayaguna secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara tahun ini - Jumlah pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara tahun lalu)/(Jumlah pemberdayaan masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan sarana/prasarana nasional secara optimal dalam rangka	Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan.

			penyelenggaraan pertahanan negara tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber Data: Laporan Ditjen Potan.	
--	--	--	--	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta pendataan dan dokumentasi keveteranan RI yang akuntabel dan tepat waktu.	Persentase Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah Veteran RI yang memperoleh pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu)/(Jumlah Veteran RI) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditveteran. 	Pembinaan keveteranan.	Direktorat Veteran.
		Jumlah rumusan Kebijakan Keveteran RI.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah rumusan Kebijakan Keveteran RI. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditveteran. 		
2.	Penerapan nilai-nilai bela negara pada masyarakat.	Persentase wilayah provinsi yang menerima sosialisasi nilai nilai Bela Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah provinsi yang menerima sosialisasi nilai nilai Bela Negara)/(Jumlah wilayah provinsi) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditbelneg. 	Pembinaan kesadaran bela negara.	Direktorat Bela Negara.
3.	Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur pertahanan secara akuntabel.	Persentase wilayah provinsi yang menerima sosialisasi komponen cadangan sesuai postur pertahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah provinsi yang menerima sosialisasi komponen cadangan sesuai postur pertahanan)/(Jumlah wilayah provinsi) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkomcad. 	Pembentukan dan pembinaan komponen cadangan.	Direktorat Komponen Cadangan.
4.	Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara terintegrasi dengan data yang terkini, akurat dan siap digunakan.	Persentase wilayah provinsi yang menerima sosialisasi komponen pendukung yang terintegrasi dengan data yang terkini dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah provinsi yang menerima sosialisasi komponen pendukung yang terintegrasi dengan data yang terkini dan akurat)/(Jumlah wilayah provinsi) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkomduk. 	Penataan dan pembinaan komponen pendukung.	Direktorat Komponen Pendukung.
5.	Tersedianya sarana	Jumlah kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan 	Pembinaan	Direktorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
	pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri.	pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri.	<p>pengembangan industri pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang dikembangkan secara mandiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dittekindhan. 	potensi teknologi dan industri pertahanan.	Teknologi dan Industri Pertahanan.

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekuatan pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer.
 - b. Pelaksanaan kebijakan Kementerian di bidang kekuatan pertahanan militer meliputi pembinaan sumber daya manusia, materiil, fasilitas, dan jasa serta kesehatan pertahanan militer.
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kekuatan pertahanan militer.
 - d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang kekuatan pertahanan militer.
 - e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Eselon I
1.	Terwujudnya kekuatan pertahanan negara yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkuathan. 	Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan.
		Persentase pelaksanaan kebijakan dibidang kekuatan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang kekuatan pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, 	

		pertahanan yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.	menindak ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu)/(Jumlah pelaksanaan kebijakan dibidang kekuatan pertahanan) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkuathan. 	
--	--	--	--	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
1.	Kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini dan akurat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditfasjas. 	Pembinaan fasilitas dan jasa pertahanan.	Direktorat Fasilitas dan Jasa.
2.	Kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem pertahanan negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	Jumlah kebijakan pertahanan Negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan pertahanan Negara di bidang kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan akurat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkes. 	Pembinaan kesehatan pertahanan.	Direktorat Kesehatan.
3.	Kelengkapan kebijakan dan implementasinya dalam pengembangan sistem kekuatan komponen utama di bidang materiil dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanan dengan pemetaan yang <i>terkini</i> dan akurat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanan dengan pemetaan yang <i>terkini</i> dan akurat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditmat. 	Pembinaan materiil pertahanan.	Direktorat Materiil.
4.	Kelengkapan kebijakan dan	Jumlah kebijakan bidang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kebijakan 	Pembinaan	Direktorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
	implementasinya dalam pengembangan sistem kekuatan komponen utama di bidang SDM dengan pemetaan yang terkini dan akurat.	SDM kekuatan komponen utama di petakan yang <i>terkini</i> dan akurat.	bidang SDM kekuatan komponen utama di petakan yang <i>terkini</i> dan akurat. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dit SDM. 	personel pertahanan.	Sumber Daya Manusia.

1. Nama Organisasi : Badan Penelitian dan Pengembangan.
2. Tugas : Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan meliputi strategi, sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan alat peralatan pertahanan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pertahanan.
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.	Persentase penerapan hasil produk Litbang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penerapan hasil produk Litbang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri}) / (\text{Jumlah produk Litbang}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Badan Penelitian dan Pengembangan.

			• Sumber data: Laporan Balitbang.	
--	--	--	-----------------------------------	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Terlaksananya pemetaan dan rekomendasi terhadap potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global.	Jumlah rekomendasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, dan global. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puslitbang Strahan. 	Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan.
2.	Model dan/atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.	Jumlah model dan /atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah model dan/ atau prototipe alat peralatan pertahanan matra darat, laut, dan udara yang sesuai kemajuan Iptek dan mampu dikembangkan secara mandiri. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puslitbang Alpalhan. 	Penelitian dan pengembangan Alpalhan.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan Pertahanan.
3.	Rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe.	Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan prototipe. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puslitbang Iptekhan. 	Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan.
4.	Rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan Iptek.	Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan Iptek.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan sesuai kemajuan Iptek. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan.	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertahanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Kegiatan	Eselon II
			• Sumber data: Laporan Puslitbang Sumber Daya.		

1. Nama Organisasi : Badan Pendidikan dan Pelatihan.
2. Tugas : Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan.
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan meliputi manajemen pertahanan, bahasa dan teknis fungsional pertahanan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dan pelatihan pertahanan.
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Pendidikan dan Pelatihan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Kemhan/TNI memenuhi standar mutu, menerapkan kemajuan Iptek serta mampu	Persentase peningkatan hasil didik yang memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk	• Formulasi penghitungan: (Jumlah hasil didik yang memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional tahun ini - Jumlah hasil didik yang memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional tahun lalu)/(Jumlah hasil didik	Badan Pendidikan dan Pelatihan.

	menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang professional.	menghasilkan lulusan yang profesional.	yang memenuhi standar mutu dengan menerapkan kemajuan Iptek serta mampu menjawab tantangan tugas untuk menghasilkan lulusan yang profesional tahun lalu) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Badiklat. 	
--	--	--	---	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Meningkatnya kemampuan kemampuan dan keterampilan berbahasa para lulusan.	Persentase meningkatnya kompetensi lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kompetensi lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun ini - Jumlah kompetensi lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun lalu)/(Jumlah kompetensi lulusan Diklat bahasa yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas kedinasan tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusediklat Bahasa. 	Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.
2.	Tersedianya lulusan yang meningkat kinerjanya dan mampu menjawab tantangan tugas di bidang manajemen	Persentase meningkatnya kompetensi lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kompetensi lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun ini - Jumlah kompetensi lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu)/(Jumlah kompetensi lulusan Diklatjemen yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas 	Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
	pertahanan.		<p>dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) x 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusdiklat Jemen. 		
3.	Tersedianya lulusan yang meningkat kinerjanya dan mampu menjawab tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan.	Persentase meningkatnya kompetensi lulusan Tekfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kompetensi lulusan Tekfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun ini - Jumlah kompetensi lulusan Tekfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu)/(Jumlah kompetensi lulusan Tekfunghan yang sesuai standar, guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai jabatan tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusdiklat Tekfunghan. 	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan.
4.	Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi bidang pertahanan.	Persentase meningkatnya kompetensi lulusan Unhan sesuai standar internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kompetensi lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun ini - Jumlah kompetensi lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun lalu)/(Jumlah kompetensi lulusan Unhan sesuai standar internasional tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Unhan. 	Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan.	Universitas Pertahanan.

1. Nama Organisasi : Badan Sarana Pertahanan.
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan sarana pertahanan.
3. Fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pengelolaan sarana pertahanan.
 - b. Pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan meliputi pengadaan jasa konstruksi dan sarana pertahanan, sertifikasi kelaikan, kodifikasi materiil dan pengelolaan aset/barang milik negara di bidang pertahanan.
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sarana pertahanan.
 - d. Pelaksanaan administrasi Badan Sarana Pertahanan.
4. Indikator Kinerja Utama Eselon I.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Eselon I
1.	Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkan secara mandiri.	Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkan secara mandiri.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana pertahanan yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu sesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkan secara mandiri. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Baranahan. 	Badan Sarana Pertahanan.

2.	Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.	Jumlah peningkatan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah peningkatan Alutsista produksi dalam negeri terpenuhi secara bertahap. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Baranahan. 	
----	--	---	---	--

5. Indikator Kinerja Utama Eselon II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
1.	Pengelolaan Barang Milik Negara Kemhan/TNI yang <i>up to date</i> , akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	Persentase pengelolaan aset milik negara yang akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pengelolaan aset milik negara yang akurat, terintegrasi, akuntabel, dan tepat waktu)/(Jumlah pengelolaan aset milik negara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusat BMN. 	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).	Pusat Barang Milik Negara.
2.	Sarana prasarana pertahanan yang memenuhi standar mutu.	Jumlah kelaikan Alutsista dan komoditi militer lainnya serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang memenuhi standar mutu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kelaikan Alutsista dan komoditi militer lainnya serta kualifikasi penyelenggara kelaikan militer yang memenuhi standar mutu. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusat Laik. 	Kelaikan sarana pertahanan.	Pusat Kelaikan.
3.	Jumlah kode NSN yang terintegrasi secara nasional dan internasional dengan dokumentasi yang akuntabel.	Jumlah Kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara nasional dan internasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Kodifikasi materiil pertahanan yang terintegrasi secara nasional dan internasional. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puskod. 	Kodifikasi materiil pertahanan.	Pusat Kodifikasi.
4.	Pembangunan konstruksi dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan secara terintegrasi, tepat waktu, dan akuntabel.	Jumlah pembangunan konstruksi pertahanan secara terintegrasi dan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan konstruksi pertahanan secara terintegrasi dan tepat waktu. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puskon. 	Pengadaan jasa konstruksi pertahanan.	Pusat Konstruksi.
5.	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan.	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Kegiatan	Eselon II
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Puskon. 	wiltas.	
6.	Pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel.	Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alutsista dan peralatan pendukung alutsista serta alat kesehatan dalam rangka pembangunan kekuatan pertahanan yang tepat waktu dan akuntabel. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusada. 	Pengadaan barang dan jasa militer.	Pusat Pengadaan.
7.	Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksi dalam negeri dan pengembangan Pinak Industri Pertahanan.	Jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan Pinak industri pertahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Alutsista TNI produksi dalam negeri dan Pinak industri pertahanan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusada. 	Produksi Alutsista Industri dalam negeri dan pengembangan pinak Indhan.	

1. Nama Unit Organisasi : Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
2. Tugas : Menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
3. Fungsi :
 - a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.
 - b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.
 - c. Pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
4. Indikator Kinerja Utama.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, 	Penggunaan Kekuatan Pertahanan

	dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	nasional, regional, maupun global yang dipetakan.	<p>tantangan, dan peluang) x 100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel TNI. 	Integratif.
		Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global yang ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional maupun global yang ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel TNI. 	
2.	Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.	Persentase wilayah perbatasan negara darat, laut, udara dan pulau terluar serta daerah terpencil yang terjaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara dan pulau terluar serta daerah terpencil yang terjaga)/(Jumlah wilayah perbatasan negara darat, laut, udara, dan pulau terluar serta daerah terpencil) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel, Sops, dan Ster TNI 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif.
		Persentase berkurangnya konflik di daerah rawan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah konflik di daerah rawan tahun lalu - Jumlah konflik di daerah rawan tahun ini)/(Jumlah konflik di daerah rawan tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel, Sops, dan Ster TNI. 	
3.	Wilayah laut dan udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu - Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun ini)/(Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara dan laut yurisdiksi nasional tahun lalu) x 100%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Profesionalisme Prajurit

			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	Integratif.
4.	Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman.	Persentase obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis yang dinyatakan aman}) / (\text{Jumlah obyek vital nasional bersifat strategis}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif. • Penyelenggaraan Manajemen dan operasional Integratif.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
A.	Terwujudnya penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi, efektif dan tepat waktu.	Persentase penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi sesuai prosedur tetap.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penggunaan kekuatan pertahanan integratif yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak ancaman secara terintegrasi sesuai prosedur tetap}) / (\text{Jumlah penggunaan kekuatan pertahanan integratif}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel, Sops, Sren, Slog, Spers, Ster, dan Skomlek TNI. 	Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.	UO Mabes TNI.
1.	Terlaksananya tugas OMP secara efektif.	Persentase satuan yang siap melaksanakan OMP.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP}) / (\text{Jumlah satuan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Staf Umum TNI. 	Operasi Militer untuk Perang (OMP).	Staf Umum TNI.
2.	Terlaksananya tugas OMSP secara efektif.	Persentase satuan yang siap melaksanakan OMSP.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP}) / (\text{Jumlah satuan}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Staf Umum TNI. 	Operasi Militer Selain Perang (OMSP).	Staf Umum TNI.
3.	Meningkatnya kondisi	Persentase penurunan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran 	Operasi Gaktib	• Staf

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	ketertiban di daerah rawan.	pelanggaran prajurit didaerah rawan.	prajurit didaerah rawan tahun lalu – Jumlah pelanggaran prajurit didaerah rawan tahun ini)/(Jumlah pelanggaran prajurit didaerah rawan tahun lalu) x 100% <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Kumulatif • Sumber data: Laporan Sintel, Spers, dan Ssuspom TNI 	dan Operasi Yustisi.	Personel. <ul style="list-style-type: none"> • Staf Intelijen. • Staf Khusus Polisi Militer.
4.	Dapat ditangkalnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan pertahanan negara.	Persentase data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hanneg.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah data intelijen yang dapat digunakan dalam rangka menangkal ATHG Hanneg)/(Jumlah data intelijen) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sintel TNI. 	Operasi Intelijen Strategis.	Staf Intelijen.
5.	Dapat berlangsungnya pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana secara tepat waktu.	Persentase operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana sesuai Peraturan Pemerintah)/(Jumlah operasi pencarian dan penyelamatan kecelakaan bencana) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	Operasi SAR TNI.	Staf Operasi.
6.	Terselenggaranya operasi bantuan perkuatan TNI kepada Polri dan operasi bantuan penanggulangan bencana.	Persentase satuan yang siap melaksanakan operasi bantuan kepada Polri dan penanggulangan bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan yang siap melaksanakan operasi bantuan kepada Polri dan penanggulangan bencana alam)/(Jumlah satuan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	Operasi Bantuan TNI.	Staf Operasi.
7.	Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan.	Jumlah operasi pemberdayaan wilayah pertahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah operasi pemberdayaan wilayah pertahanan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ster TNI. 	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.	Staf Teritorial.
8.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan senjata,	Persentase senjata, munisi, dan kendaraan taktis/	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah senjata, munisi, 	Pemeliharaan Alut Integratif.	Staf Logistik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	munisi, dan kendaraan taktis/kendaraan tempur.	kendaraan tempur yang siap operasional.	dan Rantis/Ranpur yang siap operasional)/(Jumlah senjata, munisi, dan Rantis/Ranpur) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI.		
9.	Meningkatnya kualitas pemeliharaan Randis/Ransus, Alkom K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan alsintor.	Persentase Randis/Ransus, Alkom K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan alsintor yang siap operasional.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah Randis/Ransus, Alkom K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan alsintor yang siap operasional)/(Jumlah Randis/Ransus, Alkom K4I, Alpalsus, Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan alsintor) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog, Skomlek, dan Puskes TNI.	Pemeliharaan Non-Alut Integratif.	• Staf Logistik. • Staf Komunikasi dan Elektronika. • Pusat Kesehatan.
B.	Terwujudnya modernisasi Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.	Persentase Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan yang memenuhi kebutuhan standar mutu sesuai kemajuan Iptek serta dikembangkan secara mandiri)/(Jumlah Alutsista/non Alutsista/Sarpras pertahanan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI.	Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpras Integratif.	UO Mabes TNI.
1.	Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah Ranpur/Rantis.	Jumlah pengadaan Ranpur/Rantis.	• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Ranpur/Rantis. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI.	Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis.	Staf Logistik.
2.	Meningkatnya kemampuan dan penambahan jumlah peralatan materiil non Alutsista.	Jumlah pengadaan materiil non Alutsista.	• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan materiil non Alutsista. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI.	Pengadaan Non Alutsista/Senjata.	Staf Logistik.
3.	Meningkatnya kemampuan (kualitas)	Jumlah pengadaan MKK.	• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan MKK.	Pengadaan MKK	Staf Logistik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dan penambahan jumlah munisi.		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 		
4.	Meningkatnya kemampuan (kualitas) dan penambahan jumlah munisi khusus.	Jumlah pengadaan munisi khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah pengadaan munisi khusus. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan Munisi Khusus.	Staf Logistik.
5.	Meningkatnya kemampuan (kualitas) dan penambahan jumlah materiil khusus.	Jumlah pengadaan materiil khusus.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan materiil khusus. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan Materiil Khusus.	Staf Logistik.
6.	Meningkatnya kemampuan (kualitas) dan penambahan jumlah MKB.	Jumlah pengadaan MKB.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan MKB. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan MKB.	Staf Logistik.
7.	Meningkatnya kemampuan (kualitas) dan penambahan jumlah Alutsista.	Jumlah pengadaan senjata/alutsista.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata/alutsista. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan Senjata.	Staf Logistik.
8.	Terlaksananya pengadaan Alpal darat, laut dan udara, Randis, Ransus, Alpalsus, Alkes, dan alat pendukung lainnya.	Jumlah pengadaan Alpal darat, laut dan udara, Alpalsus, Alkes, dan alat pendukung lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alpal darat, laut dan udara, Alpalsus, Alkes, dan alat pendukung lainnya. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan Non Alut.	Staf Logistik.
9.	Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung	Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya. 	Pembangunan Sarpras Pendukung.	Staf Logistik.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	lainnya.	pendukung lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 		
10.	Meningkatnya kemampuan (kualitas) Alutsista integrative.	Jumlah pengadaan Alutsista integratif.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alutsista integratif. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif.	Staf Logistik.
C.	Meningkatnya profesionalisme prajurit baik kemampuan maupun kekuatan dalam rangka penggunaan kekuatan yang sesuai standar mutu dan kemajuan Iptek.	Persentase prajurit yang profesional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah prajurit yang profesional}) / (\text{Jumlah prajurit}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spers dan Sops TNI. 	Profesionalisme Prajurit Integratif.	UO Mabes TNI.
1.	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pertama (Dikma).	Jumlah pendidikan pertama.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan pertama. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spers TNI. 	Pendidikan Pertama dan Penerimaan (Werving) TNI/PNS.	Staf Personel.
2.	Terlaksananya kegiatan pendidikan profesi dan keahlian.	Jumlah pendidikan profesi keahlian.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan profesi keahlian. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spers TNI. 	Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi.	Staf Personel.
3.	Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka tugas OMP dan OMSP.	Jumlah latihan kesiapsiagaan yang dilaksanakan satuan dalam rangka kesiapsiagaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan kesiapsiagaan yang dilaksanakan satuan dalam rangka kesiapsiagaan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma Internasional.	Staf Operasi.
4.	Memelihara serta meningkatkan kemampuan dan kesiapsiagaan satuan	Jumlah latihan pembinaan Balakpus.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan pembinaan Balakpus. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 	Latihan Pembinaan Balakpus TNI.	Staf Operasi.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	untuk mendukung tugas pokok satuan.		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Sops TNI. 		
5.	Meningkatnya dan menguji kemampuan unsur-unsur TNI yang akan melaksanakan tugas ke daerah rawan dan perbatasan dalam bentuk latihan pratugas operasi.	Jumlah latihan pratugas operasi satuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan pratugas operasi satuan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops TNI. 	Latihan Pratugas Operasi.	Staf Operasi.
6.	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum.	Persentase kecukupan fasilitas profesionalisme personel secara minimum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah kecukupan fasilitas profesionalisme personel secara minimum)/(Jumlah fasilitas profesionalisme personel) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spers dan Slog TNI. 	Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Integratif.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Staf Personel.
D.	Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI.	Persentase Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah Satker yang menerapkan manajemen yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat di lingkungan TNI)/(Jumlah Satker yang menerapkan manajemen) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Itjen TNI. 	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif.	UO Mabes TNI.
1.	Terlaksananya pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu dan tepat jumlah sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Persentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang diterima tepat waktu dan tepat jumlah)/(Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS TNI) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spers TNI. 	Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif.	Staf Personel.
2.	Terlaksananya kegiatan	Jumlah kegiatan yang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah kegiatan 	Penyelenggaraan	Staf Umum

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI.	dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI.	yang dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas-tugas TNI. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Staf Umum TNI. 	Operasional Perkantoran.	TNI.
3.	Mengoptimalkan penggunaan gedung perkantoran dengan menyediakan dan memelihara bangunan beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam menunjang operasional satuan.	Jumlah gedung perkantoran yang terpelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah gedung perkantoran yang terpelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slog TNI. 	Penyelenggaraan Pemeliharaan/ Perawatan Perkantoran Integratif.	Staf Logistik.
4.	Terlaksananya perawatan sarana dan prasarana perkantoran untuk kepentingan tugas-tugas TNI.	Jumlah sarana prasarana yang terpelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana prasarana yang terpelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Staf Umum TNI. 	Perawatan Sarana dan Prasarana.	Staf Logistik.
5.	Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.	Jumlah produk sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk sistem dan evaluasi kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Srenum dan Itjen TNI. 	Pengembangan Sistem Dan Evaluasi Kinerja Integratif.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Kebijakan Strategi dan Kebijakan Umum. • Inspektorat Jenderal.

1. Nama Unit Organisasi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan.
 - b. Melaksanakan tugas TNI dalam menjaga keamanan wilayah perbatasan darat dengan negara lain.
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat.
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat.
3. Fungsi :
 - a. Menyelenggarakan Fungsi Utama Pertempuran dan Pembinaan Teritorial.
 - b. Menyelenggarakan Fungsi Organik yang meliputi Intelijen, Operasi, Sumber Daya Manusia, Logistik, Teritorial, Perencanaan, Pengawasan dan Pemeriksaan serta Penyiapan Kekuatan Matra Darat.
 - c. Menyelenggarakan Fungsi Teknis Umum yang meliputi Infanteri, Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara, Penerbangan, Zeni, Perhubungan, Peralatan, Pembekalan Angkutan, Kesehatan, Polisi Militer, Ajudan Jenderal, Topografi, Hukum, dan Keuangan.
 - d. Menyelenggarakan Fungsi Teknis Militer Khusus, meliputi operasi khusus yang bernilai strategis maupun taktis dan bersifat terpilih guna mendukung pertempuran di darat, di laut, dan di udara yang dilakukan Pasukan Khusus (Kopassus) serta operasi khusus yang bernilai strategis maupun taktis dengan melaksanakan operasi lintas udara dan *raid* guna mendukung pertempuran darat yang dilakukan Pasukan Linud dan Pasukan Raider.

- e. Menyelenggarakan Fungsi Teknis Khusus, yang meliputi Jasmani Militer, Pembinaan Mental, Psikologi, Penelitian dan Pengembangan, Sejarah, Sistem Informasi, Penerangan, Pengendalian Personel, Kelaikan serta Pelayanan Pengadaan.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra darat yang dipetakan dan ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra darat yang dipetakan dan ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra darat) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamad dan Sterad. 	Dukungan Kesiapan Matra Darat.
2.	Seluruh wilayah perbatasan darat memiliki batas wilayah yang jelas dan bebas pelanggaran wilayah.	Persentase wilayah perbatasan darat yang terpetakan dalam peta topografi yang valid.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah wilayah perbatasan darat yang terpetakan dalam peta topografi yang valid)/(Jumlah wilayah perbatasan darat) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Dittopad. 	Dukungan Kesiapan Matra Darat.
3.	Seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan, memiliki daya tangkal yang handal dalam menghadapi setiap ancaman yang muncul.	Persentase seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan yang terjaga)/(Jumlah seluruh wilayah, terutama daerah terpencil dan perbatasan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad. 	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
A.	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD	Persentase Alutsista dan non Alutsista siap operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista dan non Alutsista siap operasional)/(Jumlah Alutsista dan non Alutsista) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sops dan Slogad. 	Dukungan Kesiapan Matra Darat.	UO TNI AD.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	menuju MEF.				
1.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah produk intelijen.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk intelijen. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamad dan Pusintelad. 	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Pengamanan. • Pusat Intelijen.
		Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamad dan Pusintelad. 		
2.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah kerjasama dengan negara sahabat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kerjasama dengan negara sahabat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad. 	Kerjasama Internasional Matra Darat.	Staf Operasi.
3.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah peta yang direvisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah peta yang direvisi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dittopad. 	Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan.	Direktorat Topografi.
4.	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan Ranpur dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.	Jumlah kendaraan tempur yang dipelihara dan dirawat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah kendaraan tempur yang dipelihara dan dirawat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditpalad. 	Pemeliharaan/ Perawatan Ranpur.	Direktorat Peralatan.
5.	Terselenggaranya pemeliharaan pesawat terbang dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.	Jumlah Pesawat terbang yang di pelihara dan dirawat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah Pesawat terbang yang di pelihara dan dirawat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puspenerbad. 	Pemeliharaan/ Perawatan Pesawat Terbang.	Pusat Penerbangan.
6.	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan alat	Jumlah alat angkut air (kapal) yang dipelihara dan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah alat angkut air 	Pemeliharaan/ Perawatan Alat	Direktorat Pembekalan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	angkut air dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.	dirawat.	(kapal) yang dipelihara dan dirawat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditbekangad.	Angkut Air.	Angkutan.
7.	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan senjata/munisi/Alpal dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.	Jumlah senjata, munisi, alat optik yang dirawat dan dipelihara. Jumlah pengadaan munisi.	• Formulasi penghitungan: Jumlah senjata, munisi, alat optik yang dirawat dan dipelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditpalad. • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan munisi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditpalad.	Pemeliharaan/ Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal.	Direktorat Peralatan.
8.	Terselenggaranya pemeliharaan peralatan dan mesin diantaranya kendaraan bermotor, mesin stasioner, alat zeni, alat perhubungan, alat kesehatan, alat topografi, alat laboratorium, alat cetak, alat satri, fasilitas latihan/prasarana latihan, perlengkapan satuan lapangan, alat musik, ATK dengan perbaikan dan penggantian suku cadang.	Jumlah kendaraan bermotor, mesin stasioner, alat zeni, alat perhubungan, alat kesehatan, alat topografi, alat laboratorium, alat cetak, alat satri, fasilitas latihan/prasarana latihan, perlengkapan satuan lapangan, alat musik, alat mesin kantor yang dipelihara dan dirawat.	• Formulasi penghitungan: Jumlah kendaraan bermotor, mesin stasioner, alat zeni, alat perhubungan, alat kesehatan, alat topografi, alat laboratorium, alat cetak, alat satri, fasilitas latihan/prasarana latihan, perlengkapan satuan lapangan, alat musik, alat mesin kantor yang dipelihara dan dirawat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditpalad, Ditziad, Dithubad, Ditkesad, Dittopad, Ditbekangad, Dislitbangad, Disinfolatad, Ditajenad, dan Dispenad.	Pemeliharaan/ Perawatan Non Alutsista.	• Direktorat Peralatan. • Direktorat Zeni. • Direktorat Perhubungan. • Direktorat Kesehatan. • Direktorat Topografi. • Direktorat Pembekalan Angkutan. • Dinas Penelitian dan Pengembangan. • Dinas Informasi dan Pengolahan Data. • Direktorat Ajudan Jenderal. • Dinas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
					Penerangan.
9.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah produk teritorial.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk teritorial. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sterad dan Pusterad. 	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Teritorial. • Pusat Teritorial.
10.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah aplikasi sisfo.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah aplikasi sisfo. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Srenad dan Disinfoahad. 	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Perencana. • Dinas Informasi dan Pengolahan Data.
11.	Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat.	Jumlah kegiatan Litbanghan TNI AD.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan Litbanghan TNI AD. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Srenad dan Dislitbangad. 	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Perencana. • Dinas Penelitian dan Pengembangan.
12.	Terselenggaranya renovasi, rehabilitasi, pemeliharaan, bangunan, gedung, kantor, sarana/prasarana konstruksi lainnya.	Jumlah sarana dan prasarana latihan yang dipelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarana dan prasarana latihan yang dipelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad. 	Pemeliharaan dan Perawatan Ksatrian dan Fasilitas Latihan/Tempur.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Zeni.
13.	Terselenggaranya pembinaan masyarakat dalam hal nasionalisme dan kedaulatan NKRI.	Jumlah kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah kegiatan pembinaan perlawanan wilayah, pembinaan komunikasi sosial dan pembinaan bakti TNI. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sterad dan Pusterad. 	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional menjadi Kekuatan Pertahanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Teritorial. • Pusat Teritorial.
14.	Terlaksananya operasi militer selain perang Matra Darat.	Jumlah kegiatan OMSP.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan OMSP. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Sterad. 	Penyelenggaraan OMSP.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Operasi. • Staf Teritorial.
B.	Terlaksananya modernisasi	Persentase penambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penambahan 	Modernisasi	UO TNI AD.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dan peningkatan Alutsista dan fasilitas/sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	alutsista dan non alutsista fasilitas serta sarpras matra darat yang terkini.	alutsista dan non alutsista fasilitas serta sarpras matra darat yang terkini)/(Jumlah penambahan alutsista dan non alutsista fasilitas serta sarpras matra darat) x 100%. <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Laporan Slogad. 	Alutsista dan Non Alutsista/ Sarana dan Prasarana Matra Darat.	
1.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista Ranpur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah pengadaan kendaraan tempur.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan kendaraan tempur. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditpalad. 	Pengadaan/ Penggantian Kendaraan Tempur.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf logistic. • Direktorat Peralatan.
2.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista pesud/ <i>rotary wing</i> dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah pengadaan pesawat terbang.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan pesawat terbang. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Puspenerbad. 	Pengadaan/ Penggantian Pesawat Terbang (Sabang).	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Pusat Penerbang.
3.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista alang air dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah Pengadaan/ penggantian alat angkut air.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Pengadaan/ penggantian alat angkut air. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditbekangad. 	Pengadaan/ Penggantian Alat Angkut Air.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Pembekalan Angkutan.
4.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan senjata berat dan ringan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah Pengadaan senjata dan alat optik .	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Pengadaan senjata dan alat optik. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Laporan Slogad dan Ditpalad. 	Pengadaan/ Penggantian Senjata dan Munisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Peralatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
5.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan materiil Alutsista dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah pengadaan alutsista.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alutsista. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, Dittopad, dan Pusintelad. 	Pengadaan/ Penggantian Materiil Alutsista.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Peralatan. • Direktorat Perhubungan. • Direktorat Zeni. • Direktorat Pembekalan Angkutan. • Direktorat Topografi. • Pusat Intelijen.
6.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan materiil non Alutsista dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah pengadaan non alutsista.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan non alutsista. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, Dittopad, Disinfohahta, Dispenad, Ditkesad, dan Dislitbangad. 	Pengadaan/ Penggantian Materiil Non Alutsista.	<ul style="list-style-type: none"> • Direktorat Kesehatan. • Staf Logistik. • Direktorat Peralatan. • Direktorat Perhubungan. • Direktorat Zeni. • Direktorat Pembekalan Angkutan. • Dinas Informasi dan Pengolahan Data. • Dinas Penelitian dan Pengembangan. • Dinas Penerangan. • Direktorat Kesehatan.
7.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan	Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran, fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan fasilitas perkantoran, fasilitas pendukung, 	Pengembangan Fasilitas Sarpras	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Zeni.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	fasilitas/sarpras tempur dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AD menuju MEF.	pendukung, fasilitas umum, perumahan serta sarana dan prasarana pangkalan.	fasilitas umum, perumahan serta sarana dan prasarana pangkalan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad.	Matra Darat.	
8.	Percepatan modernisasi Alutsista melalui Pinjaman Luar Negeri (PLN).	Jumlah pengadaan ranpur, rantis, senjata, pesawat terbang, alat angkut air, dan sarpras pendukung alutsista.	• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan ranpur, rantis, senjata, pesawat terbang, alat angkut air dan sarpras pendukung alutsista • Tipe penghitungan: Non kumulatif • Sumber data: Laporan Slogad, Ditpalad, Dithubad, Ditziad, Ditbekangad, dan Puspenerbad	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Peralatan. • Direktorat Perhubungan. • Direktorat Zeni. • Direktorat Pembekalan Angkutan. • Pusat Penerbang.
C.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Persentase pemenuhan jumlah personel sesuai TOP/DSPP.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah personel sesuai TOP/DSPP}) / (\text{Jumlah personel}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Spersad. 	Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat.	UO TNI AD.
Persentase kualitas personel sesuai kompetensi.		<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah kualitas personel sesuai kompetensi}) / (\text{Jumlah kualitas personel}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Spersad. 			
1.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah latihan dan penataran.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan dan penataran. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Kodiklat. 	Latihan Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Operasi. • Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
2.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad. 	Latihan Bersama Internasional.	Staf Operasi.
3.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah lulusan pendidikan pertama.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah lulusan pendidikan pertama. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kodiklat. 	Pendidikan Pertama Matra Darat.	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.
4.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah lulusan Pendidikan pembentukan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah lulusan Pendidikan pembentukan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kodiklat. 	Pendidikan Pembentukan Matra Darat.	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.
5.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah lulusan Pendidikan pengembangan umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah lulusan Pendidikan pengembangan umum. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kodiklat. 	Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat.	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.
6.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah lulusan Pendidikan pengembangan spesialisasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah lulusan Pendidikan pengembangan spesialisasi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kodiklat. 	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat.	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
7.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah lulusan Pendidikan profesi dan keahlian.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah lulusan Pendidikan profesi dan keahlian. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kodiklat. 	Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat.	Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.
8.	Tercukupinya fasilitas profesionalisme personel secara minimum.	Jumlah pembangunan sarpras pendidikan dan latihan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan sarpras pendidikan dan latihan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spersad, Slogad, dan Ditziad. 	Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Matra Darat.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Personel. • Staf Logistik. • Direktorat Zeni.
D.	Terwujudnya kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Persentase satuan TNI AD yang sesuai Evaluasi Kemantapan dan Kesiapsiagaan Operasional (EKKO).	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah satuan TNI AD yang sesuai Evaluasi Kemantapan dan Kesiapsiagaan Operasional}) / (\text{Jumlah satuan TNI AD}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad. 	Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat.	UO TNI AD.
1.	Melanjutkan dukungan gaji, honorarium dan tunjangan bagi prajurit dan PNS, dukungan uang lembur dan honor pokja untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AD, melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kebutuhan untuk tunjangan <i>brevet</i> , <i>representasi</i> dan insentif.	Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS yang diterima tepat waktu}) / (\text{Jumlah pemenuhan hak-hak Prajurit dan PNS}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spersad. 	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat.	Staf Personel.
2.	Melanjutkan penyelenggaraan dukungan kegiatan sehari-hari guna	Jumlah kegiatan adm perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan adm perkantoran. 	Penggiatan Fungsi Matra	Seluruh Satker.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	melaksanakan kegiatan manajemen administrasi perkantoran khususnya ATK untuk kelancaran pelaksanaan tugas di Kotamawil, Kotamapus, dan Balakpus jajaran TNI AD.		<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan seluruh Satker. 	Darat.	
3.	Menanggulangi terjadinya pelanggaran disiplin maupun hukum personel TNI AD.	Jumlah penyelesaian perkara hukum dan disiplin.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penyelesaian perkara hukum dan disiplin. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puspomad. 	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat.	Pusat Polisi Militer.
4.	Tersusunnya produk hukum, terlaksananya konsultasi legal, advokasi hukum personel TNI.	Jumlah kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Ditkumad. 	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.	Direktorat Hukum.
5.	Melanjutkan kegiatan pengadaan makan dan minum penambahan daya tahan tubuh dan uang makan PNS.	Jumlah PNS yang menerima uang makan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah PNS yang menerima uang makan tepat waktu. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan seluruh Satker. 	Penyelenggaraan Administrasi Personel.	Seluruh Satker.
6.	Menyelenggarakan renovasi, rehabilitasi, pemeliharaan, bangunan, gedung, kantor, rumah sarpras kontruksi lainnya.	Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang di pelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas yang dipelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditziad. 	Pemeliharaan/ Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Zeni.
7.	Melanjutkan dukungan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) serta untuk mendukung kelancaran kegiatan mobilitas satuan	Jumlah pemakaian BMP sesuai pagu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pemakaian BMP sesuai pagu. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogad dan Ditbekangad. 	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal.	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Logistik. • Direktorat Pembekalan Angkutan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dan latihan serta pergeseran pasukan di satuan jajaran TNI AD, melanjutkan dukungan Kaporlap prajurit TNI AD sesuai dengan norma kepemilikan.	Jumlah pengadaan Kaporlap.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Kaporlap. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan. 		
8.	Melaksanakan penerangan pasukan dan penerangan umum.	Jumlah produk penerangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk penerangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispenad. 	Penyelenggaraan Penpas dan Penum.	Dinas Penerangan.
9.	Meningkatnya profesionalisme TNI AD yang meliputi kegiatan pendidikan dan latihan fungsional, pembinaan mental, rapat koordinasi/ kerja/dinas/pimpinan/ kelompok kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan kesenian, kegiatan anggaran rutin dan dukungan pelayan.	Jumlah kegiatan administrasi umum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan administrasi umum. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan seluruh Satker. 	Penyelenggaraan Administrasi Umum.	Seluruh Satker.
10.	Menyusun produk-produk perencanaan dan melaksanakan tata kelola anggaran yang akuntabel.	Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Srenad. 	Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan.	Staf Perencana.
		Jumlah pelaporan keuangan sesuai SAI dan SAKPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pelaporan keuangan sesuai SAI dan SAKPA • Tipe penghitungan: Non kumulatif • Sumber data: Laporan Ditkuad 		Direktorat Keuangan.
		Jumlah produk doktrin dan bujuk (judul) yang disusun/	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk doktrin dan bujuk yang disusun/revisi. 		<ul style="list-style-type: none"> • Staf Operasi. • Komando

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
		revisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsad dan Kodiklat. 		Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan.
11.	Terlaksananya dukungan sesuai fungsi organisasi teknik dan tata kerja, tenaga manusia dan perawatan untuk mewujudkan kekuatan dan kemampuan TNI AD menuju MEF.	Jumlah satuan kerja yang kinerja dan perbendaharaan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah satuan kerja yang kinerja dan perbendaharaan sesuai ketentuan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Itjenad. 	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan.	Inspektorat Jenderal.

1. Nama Unit Organisasi : Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Laut.

2. Tugas :

- a. Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan.
- b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
- c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.
- d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra laut.
- e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

3. Fungsi :

- a. Membantu di dalam penyusunan kebijakan tentang pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer matra laut.
- b. Membantu di dalam komponen pertahanan sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Laut.
- c. Penyampaian hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Panglima TNI.

4. Indikator Kinerja Utama.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program
1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan,	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra laut yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, 	Dukungan Kesiapan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	nasional, regional, maupun global aspek matra laut yang dipetakan.	hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global) x 100% • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamal.		Matra Laut.
		Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra laut yang ditindaklanjuti.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra laut yang ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamal.		
2.	Wilayah laut yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Persentase penurunan pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional tahun lalu – Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional tahun ini)/(Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi nasional tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamal.		Dukungan Kesiapan Matra Laut.
3.	Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman.	Persentase obyek vital nasional aspek laut bersifat strategis yang dinyatakan aman.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah obyek vital nasional aspek laut bersifat strategis yang dinyatakan aman)/(Jumlah obyek vital nasional aspek laut bersifat strategis) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsal.		Dukungan Kesiapan Matra Laut.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
A.	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas	Persentase satuan TNI AL yang siap tempur.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah satuan TNI AL yang siap tempur)/(Jumlah satuan TNI AL) x	Dukungan kesiapan matra laut.	UO TNI AL.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
	sesuai standard dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi.		100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsal.		
1.	Peningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros Matra Laut.	Jumlah Peta laut.	• Formulasi penghitungan: Jumlah Peta laut. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dishidrosal.	Penyelenggaraan Surta Hidros.	Dinas Hidrografi dan Oceanografi.
2.	Meningkatnya sistem dan metodologi evaluasi kinerja TNI AL.	Jumlah aplikasi sistem dan metode kinerja TNI AL.	• Formulasi penghitungan: Jumlah aplikasi system dan metode kinerja TNI AL. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disinfohaताल.	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja Matra Laut.	Dinas Informasi dan Pengolahan Data.
3.	Peningkatan uji kelaikan TNI AL baik secara kualitas dan kuantitas.	Jumlah sertifikat uji kelaikan TNI AL.	• Formulasi penghitungan: Jumlah sertifikat uji kelaikan TNI AL. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Kelaikan Materiil.	Penyelenggaraan uji kelaikan materiil dan fasilitas Matra Laut.	Dinas Kelaikan Materiil.
4.	Peningkatan kesiapan sarpras komunikasi, persandian dan pernika komunikasi TNI AL.	Jumlah alkom, sandi, pernika yang dipelihara TNI AL.	• Formulasi penghitungan: Jumlah alkom, sandi, pernika yang dipelihara TNI AL. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Komunikasi dan Peperangan Elektronika.	Pemeliharaan/ perawatan peralatan Komlek Matra Laut.	Dinas Komunikasi dan Elektronika.
5.	Peningkatan kesiapan peralatan senjata, elektronika dan amunisi TNI.	Jumlah pengadaan senjata dan amunisi.	• Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata dan amunisi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Materiil Senjata dan Elektronika.	Pemeliharaan/ perawatan peralatan senlek dan amunisi Matra Laut.	Dinas Materiil Senjata dan Elektronika.
6.	Peningkatan kesiapan Alpung, KRI,	Jumlah pemeliharaan dan	• Formulasi penghitungan: Jumlah	Pemeliharaan/	Dinas Materiil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
	KAL, Ranpur/Rantis Matra Laut.	perawatan Alpeng, KRI, KAL, Ranpur/Rantis Matra Laut.	<p>pemeliharaan dan perawatan Alpeng, KRI, KAL, Ranpur/Rantis Matra Laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Materiil. 	perawatan Alpeng, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis.	
7.	Peningkatan penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional serta kesiapsiagaan TNI AL.	Persentase penyelesaian pelanggaran hukum di laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyelesaian pelanggaran hukum di laut}) / (\text{Jumlah pelanggaran hukum di laut}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsal. 	Penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Laut dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah Laut yurisdiksi nasional.	Staf Operasi.
8.	Peningkatan Litbanghan TNI AL secara kualitas dan kuantitas.	Jumlah produk penelitian pengembangan pertahanan TNI AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk penelitian pengembangan pertahanan TNI AL. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Penelitian dan Pengembangan. 	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Laut.	Dinas Penelitian dan Pengembangan.
9.	Meningkatnya produk/data intelijen baik secara kualitas maupun kuantitas serta meningkatnya pengamanan sesuai standar.	Jumlah produk intelijen.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk intelijen. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pengamanan. 	Penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Laut.	Dinas Pengamanan.
10	Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan wilayah pertahanan negara Matra Laut.	Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Potensi Maritim. 	Penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.	Dinas Pembinaan Potensi Maritim.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
11.	Persentase kesiapan dan keberhasilan pusat peningkatan kesiapan dan keberhasilan pusat penerbangan TNI AL dalam mendukung tugas operasi.	Jumlah pemeliharaan perawatan pesawat udara TNI AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pemeliharaan perawatan pesawat udara TNI AL. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusat Penerbangan. 	Pemeliharaan/Perawatan pesawat.	Pusat Penerbangan.
B.	Kemampuan dan kekuatan TNI AL meningkat dan siap operasional mendukung pelaksanaan tugas, sesuai standar dan kebutuhan, dengan daya dukung, daya tangkal dan daya gempur yang tinggi.	Persentase Alutsista dan non Alutsista siap operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista dan non Alutsista siap operasional)/(Jumlah Alutsista dan non Alutsista) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Materiil. 	Modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas sarpras matra laut.	UO TNI AL.
1.	Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah fasilitas serta sarana/prasarana pangkalan TNI AL.	Jumlah dermaga yang di bangun dan rehab.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah dermaga yang di bangun dan rehab. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Fasilitas dan Pangkalan. 	Peningkatan/pengadaan fasilitas dan sarpras Matra Laut.	Dinas Fasilitas Pangkalan.
2.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah peralatan Surta Hidros.	Jumlah alat survey hidro oceano grafi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah alat survey hidro oceanografi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Hidro-Oceanografi. 	Peningkatan/pengadaan peralatan Surta Hidros.	Dinas Hidrografi dan Oceanografi.
3.	Peningkatan kesiapan dan penambahan peralatan sarpras Komlek TNI AL.	Jumlah pengadaan alat komunikasi dan elektronika.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alat komunikasi dan elektronika. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Komunikasi dan Peperangan 	Peningkatan/pengadaan peralatan Komlek Matra Laut.	Dinas Komunikasi dan Elektronika.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
			Elektronika.		
4.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Senlek dan amonisi.	Jumlah pengadaan senjata dan amunisi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan senjata dan amunisi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Materiil Senjata dan Elektronika. 	Peningkatan/ pengadaan Senlek dan amonisi Matra Laut.	Dinas Materiil Senjata dan Elektronika.
5.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Alpung, KRI, KAL, Ranpur, dan Rantis.	Jumlah pengadaan Alpung, KRI, KAL, kendaraan tempur, dan kendaraan taktis.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah Jumlah pengadaan Alpung, KRI, KAL, kendaraan tempur dan kendaraan taktis. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Materiil. 	Peningkatan/ pengadaan alpung, KRI, KAL dan Ranpur/Rantis Matra Laut.	Dinas Materiil.
6.	Penambahan jumlah peralatan passusla dan materiil non Alutsista Matra Laut.	Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus laut dan materiil non Alutsista Matra Laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus laut dan materiil non Alutsista Matra Laut. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pembekalan. 	Peningkatan/ pengadaan peralatan Passusla dan materiil non Alutsista Matra Laut.	Dinas Pembekalan.
7.	Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.	Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata Strategis Matra Laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata Strategis Matra Laut. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pengadaan. 	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.	Dinas Pengadaan.
8.	Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesud beserta sarpras penerbangan TNI AL.	Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara TNI AL. 	Peningkatan/ pengadaan pesud dan sarpras penerbangan Matra	Pusat Penerbangan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Komandan Pusat Penerbangan. 	Laut.	
C.	Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki oleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dan dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP.	Persentase personel yang kompeten.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah personel yang kompeten}) / (\text{Jumlah personel}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spersal. 	Peningkatan profesionalisme personil matra laut.	UO TNI AL.
1.	Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi personel untuk mengikuti pendidikan sesuai kebutuhan/standar (secara kualitas maupun kuantitas).	Jumlah personel yang lulus seleksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah personel yang lulus seleksi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Administrasi Personil. 	Werving dan seleksi.	Dinas Administrasi Personil.
2.	Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalisme Matra Laut.	Jumlah pembangunan fasilitas dan sarana prasarana.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pembangunan fasilitas dan sarana prasarana. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas fasilitas dan pangkalan. 	Pembangunan fasilitas dan sarpras profesionalisme pesonel Matra Laut.	Dinas fasilitas pangkalan.
3.	Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL.	Jumlah latihan operasi yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah latihan operasi yang dilaksanakan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Staf Operasi. 	Penyelenggaraan latihan operasi Matra Laut.	Staf Operasi.
4.	Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semua strata dan sesuai standar.	Jumlah pendidikan yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pendidikan yang dilaksanakan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pendidikan. 	Pendidikan Pertama, pengembangan umum, spesialisasi, profesi dan keterampilan serta pendidikan pembentukan Matra Laut.	Dinas Pendidikan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuan TNI AL sesuai standar serta kesiapan operasi psikologi TNI AL.	Jumlah pelayanan psikologi matra laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pelayanan psikologi matra laut. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pendidikan. 	Penyelenggaraan psikologi Matra Laut.	Dinas Pendidikan.
D.	Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AL, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, serta akuntabilitas dan optimalisasi kinerja.	Persentase menurunnya pelanggaran hukum dan disiplin prajurit TNI AL.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan disiplin prajurit TNI AL tahun lalu – Jumlah pelanggaran hukum dan disiplin prajurit TNI AL tahun ini)/(Jumlah pelanggaran hukum dan disiplin prajurit TNI AL tahun lalu) x 100%. • Tipe penghitungan: Kumulatif. • Sumber data: Laporan Spersal dan Pusat Polisi Militer. 	Penyelenggaraan manajemen dan operasional matra laut.	UO TNI AL.
1.	Peningkatan administrasi personel TNI AL.	Jumlah data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah data personel yang memenuhi syarat sesuai dengan klasifikasi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Administrasi Personil. 	Penyelenggaraan administrasi personel Matra Laut.	Dinas Administrasi Personil.
2.	Peningkatan kesiapan fasilitas dan sarpras pangkalan TNI AL serta peningkatan dukungan/ kelancaran pengelolaan LTGA.	Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pemakaian LTGA sesuai pagu)/(Jumlah pemakaian LTGA) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas fasilitas dan pangkalan. 	Pemeliharaan/ Perawatan peralatan fungsional, fasilitas, dan sarpras pengelolaan LTGA.	Dinas fasilitas pangkalan.
3.	Terpenuhinya hak pelayanan kesehatan personel TNI AL beserta keluarganya baik secara kualitas maupun kuantitas.	Persentase personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah personel beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan)/(Jumlah personel) x 100%. 	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan matra laut.	Dinas Kesehatan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan. 		
4.	Peningkatan pembinaan okum dan dukungan okum TNI AL.	Jumlah penyelesaian perkara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penyelesaian perkara hukum. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas pembinaan hukum. 	Penyelenggaraan pembinaan okum Matra Laut.	Dinas Pembinaan Hukum.
5.	Peningkatan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan TNI AL.	Persentase pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelaporan keuangan sesuai dengan SAI dan SAKPA)/(Jumlah pelaporan keuangan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Keuangan. 	Penyelenggaraan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan Matra Laut.	Dinas Keuangan.
6.	Peningkatan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Laut.	Persentase penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan sesuai ketentuan.)/(Jumlah penyelesaian administrasi perbekalan) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Pembekalan. 	Penyelenggaraan administrasi perbekalan dan dukungan bekal Matra Laut.	Dinas Pembekalan.
7.	Peningkatan Penpas dan Penum TNI AL.	Jumlah produksi penerangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produksi penerangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Penerangan. 	Penyelenggaraan penerangan pasukan dan penerangan umum Matra Laut.	Dinas Penerangan.
8.	Terpenuhinya hak perawatan personel TNI AL baik secara kualitas maupun kuantitas.	Persentase personel yang mendapatkan hak perawatan personel.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah personel yang mendapatkan hak perawatan personel)/(Jumlah personel) x 100%. 	Penyelenggaraan administrasi perawatan personel Matra Laut.	Dinas Perawatan Personel.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/Kegiatan	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dinas Perawatan Personel. 		
9.	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan TNI AL.	Jumlah satuan kerja yang kinerjanya sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah satuan kerja yang kinerjanya sesuai ketentuan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Inspektorat Jenderal. 	Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan Matra Laut.	Inspektorat Jenderal.
10.	Peningkatan fungsi Kepolisian Militer TNI AL.	Jumlah penegakan hukum, ketertiban dan disiplin yang dilaksanakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penegakan hukum, ketertiban dan disiplin yang dilaksanakan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Pusat Polisi Militer. 	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut.	Pusat Polisi Militer.
11.	Peningkatan administrasi umum TNI AL.	Persentase penyelesaian administrasi yang sesuai dengan ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penyelesaian administrasi yang sesuai dengan ketentuan}) / (\text{Jumlah penyelesaian administrasi}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan. 	Penyelenggaraan administrasi umum Matra Laut.	Sekretariat Umum.

1. Nama Unit Organisasi : Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara.
2. Tugas :
 - a. Melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan.
 - b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
 - c. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara.
 - d. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.
3. Fungsi :
 - a. Pembinaan kekuatan organisasi, personel, materiil, fasilitas dan jasa, sistem dan metode, serta anggaran dalam rangka terlaksananya tugas TNI Angkatan Udara.
 - b. Pembinaan kemampuan untuk mewujudkan suatu kemampuan operasional berbasis profesionalitas yang dapat diandalkan guna mencapai keberhasilan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Penggunaan kekuatan TNI AU sebagai penangkal, penindak dan pemulih.
4. Indikator Kinerja Utama.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program
-----	-------------------	-------------------------	---------------------	---------

1.	Seluruh potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global dipetakan dan ditindaklanjuti secara efektif.	Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara yang dipetakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara yang dipetakan)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamau. 	Dukungan Kesiapan Matra Udara.
		Persentase potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara yang ditindaklanjuti.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara yang ditindaklanjuti)/(Jumlah potensi ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, dan peluang baik nasional, regional, maupun global aspek matra udara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamau. 	
2.	Wilayah udara yurisdiksi nasional bebas dari pelanggaran hukum dan gangguan keamanan.	Persentase pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang dapat diselesaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional yang dapat diselesaikan)/(Jumlah pelanggaran hukum dan gangguan keamanan wilayah udara yurisdiksi nasional) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Spamau. 	Dukungan Kesiapan Matra Udara.
3.	Seluruh obyek vital nasional yang bersifat strategis aman.	Persentase gangguan keamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis dari aspek udara yang dapat diselesaikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah gangguan keamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis dari aspek udara yang dapat diselesaikan)/(Jumlah gangguan keamanan terhadap Obyek Vital Nasional yang bersifat strategis dari aspek udara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsau. 	Dukungan Kesiapan Matra Udara.

5. Indikator Kinerja Utama Eselon I dan II.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
A.	Tercapainya tingkat kesiapan Alutsista, non Alutsista, organisasi, doktrin, fasilitas	Persentase Alutsista dan non Alutsista siap operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah Alutsista dan non Alutsista siap operasional)/(Jumlah 	Dukungan kesiapan matra	UO TNI AU.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	dan Sarpras serta kekuatan pendukung Matra Udara.		Alutsista dan non Alutsista) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Slogau.	udara.	
1.	Peningkatan penyelenggaraan operasi militer selain perang Matra Udara dan penegakan hukum serta penjagaan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional.	Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara.	• Formulasi perhitungan: Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara. • Tipe Perhitungan: Non Kumulatif. • Sumber Data: Laporan Sopsau.	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara.	Staf Operasi.
		Persentase penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional yang diselesaikan.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional yang diselesaikan)/(Jumlah penegakan hukum dan penjagaan keamanan di wilayah yurisdiksi nasional) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsau.		
2.	Terpeliharanya dan tersedianya materiil TNI AU untuk mengganti Alutsista yang telah berakhir usia pakainya.	Jumlah alutsista yang tersedia dan terpelihara.	• Formulasi penghitungan: Jumlah alutsista yang tersedia dan terpelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disaeroau.	Pemeliharaan/ perawatan pesawat udara, senjata dan Almatsus lainnya.	Dinas Aeronautika.
3.	Terpeliharanya dan tersedianya dukungan operasi penerbangan Matra Udara.	Jumlah alpalsus yang siap mendukung operasi penerbangan.	• Formulasi penghitungan: Jumlah alpalsus yang siap mendukung operasi penerbangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disbangopsau.	Penyelenggaraan dukungan operasi penerbangan.	Dinas Pengembangan Operasi.
4.	Terlaksananya penyempurnaan perangkat, peraturan dan doktrin serta sistem dan metode untuk mendukung tugas TNI AU.	Jumlah sistem informasi manajemen yang disusun.	• Formulasi penghitungan: Jumlah sistem informasi manajemen yang disusun. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disinfohtaau.	Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja Matra Udara.	Dinas Informasi dan Pengolahan Data.
		Jumlah perangkat, peraturan dan doktrin yang	• Formulasi penghitungan: Jumlah perangkat, peraturan dan doktrin yang		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
		disusun.	<ul style="list-style-type: none"> • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disinfohtaau. 		
5.	Peningkatan pemeliharaan/ perawatan radar, PSU dan Almatsus Komlek lainnya.	Jumlah radar, PSU dan Almatsus Komlek yang tersedia dan terpelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah radar, PSU dan Almatsus Komlek yang tersedia dan terpelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Diskomleka. 	Pemeliharaan/ perawatan radar, PSU dan Almatsus Komlek lainnya.	Dinas Komunikasi dan Elektronika.
6.	Peningkatan penyelenggaraan uji kelaikan Matra Udara.	Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan matra udara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan matra udara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dislambangjau. 	Penyelenggaraan uji kelaikan materiil dan fasilitas Matra Udara.	Dinas Keselamatan Terbang dan Kerja.
7.	Peningkatan penyelenggaraan Litbanghan Matra Udara.	Jumlah produk Litbanghan matra udara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk Litbanghan matra udara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dislitbangau. 	Litbanghan Matra Udara.	Dinas Penelitian dan Pengembangan.
8.	Peningkatan penyelenggaraan intelijen dan pengamanan Matra Udara.	Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan matra udara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk kegiatan pengamanan matra udara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispamsanau. 	Penyelenggaraan Intelijen dan pengamanan Matra Udara.	Dinas Pengamanan dan Sandi.
9.	Peningkatan penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan Matra Udara.	Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispotdirgaau. 	Penyelenggaraan pemberdayaan wilayah pertahanan Matra Udara.	Dinas Potensi Kedirgantaraan.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
10.	Peningkatan penyelenggaraan Surta.	Jumlah produk survei dan pemetaan matra udara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk survei dan pemetaan matra udara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispotrudau. 	Penyelenggaraan Surta.	Dinas Survey dan Pemetaan Udara.
B.	Terlaksananya modernisasi dan peningkatan Alutsista dan fasilitas, sarpras dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan serta kemampuan TNI AU menuju MEF.	Persentase alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara yang siap operasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara yang siap operasi)/(Jumlah alutsista, non alutsista, fasilitas serta sarpras matra udara) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disadaau, Disaeroau, Diskomlekau, Disaeroau, dan Dismataau. 	Modernisasi alutsista dan non alutsista serta pengembangan fasilitas dan sarpras matra udara.	UO TNI AU.
1.	Percepatan peningkatan alutsista strategis Matra Udara.	Jumlah pengadaan alutsista yang sesuai MEF.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pengadaan alutsista yang sesuai MEF. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disadaau. 	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara (PHLN/KE).	Dinas Pengadaan.
2.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah pesawat udara.	Jumlah pesawat yang siap operasional.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah pesawat yang siap operasional. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disaeroau. 	Peningkatan/ pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya.	Dinas Aeronautika.
3.	Terlaksananya peningkatan sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU melalui pembangunan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan.	Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang dibangun. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disfaskonau. 	Peningkatan/ pembangunan fasilitas dan sarpras Matra Udara.	Dinas Fasilitas dan Kontruksi.
		Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang terpelihara.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU yang terpelihara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. 		

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
			<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan Disfaskonau. 		
4.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah radar dan alat komlek lainnya.	Jumlah radar dan alkomlek yang siap operasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah radar dan alkomlek yang siap operasi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Diskomlekau. 	Peningkatan/ Pengadaan radar, PSU dan alat Komlek lainnya.	Dinas Komunikasi dan Elektronika.
5.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah Senri/Senrat/PSU.	Jumlah senjata ringan/senjata berat/PSU yang siap operasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah senjata ringan/senjata berat/PSU yang siap operasi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disaeroau. 	Peningkatan/ pengadaan Senri/Senrat.	Dinas Aeronautika.
6.	Peningkatan kemampuan dan penambahan jumlah non Alutsista.	Jumlah non alutsista yang siap digunakan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah non alutsista yang siap digunakan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dismataau. 	Pengadaan peralatan non Alutsista.	Dinas Materiil.
C.	Terpenuhinya profesionalisme personel matra udara sesuai DSP, peningkatan dan kesiapan personel.	Persentase personel yang berkualitas sesuai dengan tuntutan tugas.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah personel yang berkualitas sesuai dengan tuntutan tugas}) / (\text{Jumlah personel}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsau, Spersau, dan Disdikau. 	Peningkatan profesionalisme personel matra udara.	UO TNI AU.
1.	Terlaksananya kegiatan latihan operasi Matra Udara.	Jumlah kegiatan latihan operasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah kegiatan latihan operasi. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Sopsau. 	Latihan Matra Udara.	Staf Operasi.
2.	Tertata kembali kebutuhan personel melalui rekrutmen yang selektif dan objektif guna memperoleh kualitas SDM sesuai kebutuhan tugas.	Persentase penerimaan personel TNI AU yang lulus seleksi.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah penerimaan personel TNI AU yang lulus seleksi}) / (\text{Jumlah penerimaan personel TNI AU}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disdikau. 	Penyelenggaraan pendidikan Matra Udara.	Dinas Pendidikan.
3.	Tercukupinya fasilitas	Persentase prajurit yang	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah prajurit yang 	Pembangunan	Dinas Fasilitas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
	kesejahteraan personel secara minimum.	menerima fasilitas perumahan/asrama.	menerima fasilitas perumahan)/(Jumlah prajurit) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disfaskonau.	sarpras kesejahteraan personel Matra Udara.	dan Kontruksi.
4.	Terpenuhinya proses latihan dan werving personel.	Jumlah personel yang lulus <i>werving</i> sesuai perencanaan.	• Formulasi penghitungan: Jumlah personel yang lulus <i>werving</i> sesuai perencanaan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disminpersau.	Werving.	Dinas Administrasi Personel.
5.	Terwujudnya profesionalisme personel dan satuan dalam rangka pencapaian sasaran pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AU menuju MEF.	Jumlah personel yang mendapatkan pelayanan psikologi matra udara.	• Formulasi penghitungan: Jumlah personel yang mendapatkan pelayanan psikologi matra udara. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispsikologiau.	Penyelenggaraan psikologi Matra Udara.	Dinas Psikologi.
D.	Meningkatnya kedisiplinan dan profesionalitas personel TNI AU, kelancaran penyelenggaraan operasional perkantoran, akuntabilitas dan optimalisasi kinerja/laporan.	Persentase personel TNI AU yang disiplin dan profesional.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah personel TNI AU yang disiplin dan profesional)/(Jumlah personel TNI AU) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Puspomau.	Penyelenggaraan manajemen dan operasional matra udara.	UO TNI AU.
1.	Meningkatnya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Militer TNI AU.	Persentase pelanggaran disiplin dan hukum personel TNI AU yang diselesaikan.	• Formulasi penghitungan: (Jumlah)/(Jumlah) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan.	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara.	Pusat Polisi Militer.
2.	Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan TNI AU.	Jumlah satker yang kinerjanya telah sesuai ketentuan.	• Formulasi penghitungan: Jumlah satker yang kinerjanya telah sesuai ketentuan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Irjenau.	Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan.	Inspektorat Jenderal.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
3.	Terpenuhinya retribusi listrik, telepon, gas dan air (LTGA) dan mengoptimalkan fasilitas LTGA yang telah dimiliki.	Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah pemakaian LTGA sesuai pagu}) / (\text{Jumlah pemakaian LTGA}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disfaskonau. 	Pemeliharaan/ perawatan peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras serta pengelolaan LTGA.	Dinas Fasilitas dan Kontruksi.
4.	Meningkatnya pelayanan kesehatan personel TNI AU.	Persentase personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan : $(\text{Jumlah}) / (\text{Jumlah}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan : Non kumulatif. • Sumber data : Laporan. 	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	Dinas Kesehatan.
5.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan keuangan yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: $(\text{Jumlah personel TNI AU beserta keluarga yang mendapatkan pelayanan kesehatan}) / (\text{Jumlah personel TNI AU beserta keluarga}) \times 100\%$. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Diskuau. 	Penyelenggaraan administrasi perencanaan, penganggaran, dan keuangan.	Dinas Keuangan.
6.	Meningkatnya penyelenggaraan pembinaan hukum TNI AU.	Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan penyelesaian perkara hukum.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah penyelenggaraan pembinaan dan penyelesaian perkara hukum. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Diskumau. 	Penyelenggaraan pembinaan hukum.	Dinas Hukum.
7.	Terselenggaranya operasional satuan dan terpeliharanya alat utama TNI AU yang dapat dioperasikan sesuai tugas dan fungsi TNI AU.	Jumlah satuan dan alat utama TNI AU yang siap dioperasikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah satuan dan alat utama TNI AU yang siap dioperasikan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dismatau. 	Penyelenggaraan administrasi perbekalan umum dan pemeliharaan	Dinas Materiil.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	P e n j e l a s a n	Program/ Kegiatan	Penanggung Jawab
				dan perawatan perkantoran.	
8.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi personel TNI AU.	Persentase dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaikan tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah dokumen administrasi personel TNI AU yang diselesaikan tepat waktu)/(Jumlah dokumen administrasi personel TNI AU) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Disminpersau. 	Penyelenggaraan administrasi personel Matra Udara.	Dinas Administrasi Personel.
9.	Meningkatnya penyelenggaraan Penpas dan Penum TNI AU.	Jumlah produk penerangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: Jumlah produk penerangan. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Dispenau. 	Penyelenggaraan penerangan pasukan dan penerangan umum Matra Udara.	Dinas Penerangan.
10.	Pengalokasian gaji, honorarium dan tunjangan, meningkatkan pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU berupa pembayaran gaji, honorarium dan tunjangan serta lembur yang dapat diterima secara tepat waktu.	Persentase pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU yang diterima tepat waktu.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU yang diterima tepat waktu.)/(Jumlah pemenuhan hak-hak prajurit dan PNS TNI AU) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Diswatpersau. 	Penyelenggaraan perawatan personel Matra Udara.	Dinas Perawatan Personel.
11.	Meningkatnya penyelenggaraan administrasi umum TNI AU.	Persentase penyelesaian administrasi umum TNI AU sesuai ketentuan.	<ul style="list-style-type: none"> • Formulasi penghitungan: (Jumlah penyelesaian administrasi umum TNI AU sesuai ketentuan)/(Jumlah penyelesaian administrasi umum TNI AU) x 100%. • Tipe penghitungan: Non kumulatif. • Sumber data: Laporan Kasetumau. 	Penyelenggaraan administrasi umum Matra Udara.	Sekretaris Umum.

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

PURNOMO YUSGANTORO

